

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan kegiatan berskala besar yang menuntut koordinasi lintas negara, lembaga, dan sektor. Setiap tahun, Indonesia mengirim lebih dari dua ratus ribu jemaah ke Tanah Suci, menjadikannya negara dengan kuota jemaah haji terbesar di dunia (Kementerian Agama RI, 2024). Melaksanakan ibadah haji adalah amalan yang sangat mulia dan terpuji. Nabi Muhammad saw sendiri hanya sekali menunaikan haji sepanjang hidupnya, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Padahal, pada masa itu beliau sebenarnya memiliki banyak kesempatan untuk berhaji setiap tahun serta dapat melakukan umrah kapan saja. Namun, berdasarkan catatan sejarah, Nabi Muhammad saw hanya melakukan umrah sebanyak tiga kali. Umrah terakhir beliau dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan haji pertama sekaligus terakhir beliau, yang dikenal dengan sebutan Haji Wada'. (Islahuddin dkk., 2021)

Ichsan (2025), menyebutkan bahwa total kuota nasional haji ditetapkan sebanyak 221 ribu jemaah, terdiri atas 203.320 jemaah reguler (92 persen) dan 17.680 jemaah haji khusus (8 persen). Kuota jemaah reguler dibagi ke seluruh provinsi berdasarkan proporsi jumlah pendaftar yang terdaftar dalam sistem Siskohat Kementerian Haji dan Umrah per 16 September 2025. Provinsi Jawa Timur menjadi penerima kuota terbesar dengan sekitar 42.409 jemaah, disusul Jawa Tengah 34.122 jemaah, dan Jawa Barat sebanyak 29.643 jemaah. Penyesuaian sistem pembagian kuota ini diharapkan memastikan setiap warga negara

memperoleh kesempatan yang lebih adil dan proporsional untuk menunaikan ibadah haji.

Penetapan kuota tahun 2026 menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya pembagian kuota antar provinsi dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan berbasis proporsi daftar tunggu jemaah haji. Mengacu pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, kementerian membagi kuota haji reguler ke dalam kuota provinsi dan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah daftar tunggu haji di masing-masing wilayah.

Pola baru berbasis daftar tunggu ini dinilai paling adil dan transparan, karena provinsi dengan jumlah pendaftar lebih besar akan memperoleh kuota yang lebih besar pula. Dengan mekanisme ini, masa tunggu jemaah antarprovinsi akan menjadi seragam sehingga tidak ada lagi kesenjangan ekstrem antara daerah yang menunggu puluhan tahun dan daerah dengan antrean singkat. Keadilan waktu tunggu ini juga berdampak langsung pada keadilan keuangan dalam konteks nilai manfaat, sebab semua jemaah akan memiliki peluang yang setara dalam mengakses dana manfaat setoran hajinya (Kementerian Haji dan Umrah RI, 2025).

Bagaskara (2025) menjelaskan bahwa berdasarkan data yang beredar pada September 2025, kuota sementara jemaah haji Kabupaten Bandung untuk penyelenggaraan haji tahun 2026 mengalami penurunan dari 2.425 jemaah pada tahun sebelumnya menjadi 430 jemaah. Data tersebut merupakan angka sementara yang beredar pada September 2025, sebelum penetapan kuota final oleh pemerintah. Berdasarkan konfirmasi langsung dari petugas Kemenhaj Kabupaten Bandung dalam wawancara penelitian ini, angka yang ditetapkan secara resmi

adalah penurunan kuota dari 2.564 menjadi 439 jemaah (INF-1 dan INF-2, Wawancara, 20 Mei 2026). Angka inilah yang digunakan sebagai data acuan dalam seluruh pembahasan penelitian ini. Penyesuaian ini mengikuti mekanisme terbaru Kementerian Haji dan Umrah yang mengacu pada Pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PIHU).

Namun, kebijakan masa tunggu ini juga menimbulkan dampak yang berbeda-beda di tiap daerah. Beberapa provinsi mengalami pengurangan masa tunggu, sementara yang lain justru mengalami penambahan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana kebijakan ini memengaruhi peluang keberangkatan jemaah secara konkret, khususnya di Kabupaten Bandung yang termasuk dalam Provinsi Jawa Barat, di mana perubahan kuota dan masa tunggu dapat berdampak signifikan. Fenomena ini menjadi unik karena jarang ada penelitian yang meninjau implikasi kebijakan nasional secara lokal, sekaligus mengaitkannya dengan persepsi keadilan, kesiapan jemaah, dan kepastian pelayanan haji.

Di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan dampak sosial dan operasional yang berbeda di masyarakat. Sebagian jemaah yang seharusnya berangkat pada tahun berjalan mengalami penundaan atau gagal berangkat, sementara sebagian lainnya justru mengalami percepatan keberangkatan atau pengurangan masa tunggu. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika yang kompleks, sehingga perlu dianalisis bagaimana kebijakan ini memengaruhi kepastian keberangkatan, persepsi keadilan, dan kesiapan jemaah di Kabupaten Bandung. Fenomena ini menjadi peta

persoalan yang menarik karena melibatkan interaksi antara kebijakan nasional, manajemen lokal, dan pengalaman calon jemaah secara langsung.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam dampak kebijakan masa tunggu, baik bagi jemaah yang mengalami penundaan keberangkatan maupun mereka yang masa tungguanya berkurang atau bertambah. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implikasi kebijakan terhadap peluang keberangkatan jemaah, sekaligus menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan haji yang lebih adil, transparan, dan terukur di Kabupaten Bandung.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana persepsi jemaah haji terhadap kebijakan masa tunggu di Kemenhaj Kabupaten Bandung?
- 2) Bagaimana ekspektasi jemaah terhadap kepastian waktu keberangkatan setelah adanya kebijakan tersebut?
- 3) Bagaimana respon sosial jemaah terhadap dampak kebijakan masa tunggu, terutama bagi mereka yang tertunda atau gagal berangkat pada tahun berjalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yang disusun berdasarkan Fokus Penelitian dari permasalahan dan dinamika kebijakan yang terjadi, meliputi:

- 1) Untuk mengetahui persepsi jemaah haji terhadap kebijakan masa tunggu di Kemenhaj Kabupaten Bandung.
- 2) Untuk mengetahui ekspektasi jemaah haji terhadap kepastian waktu keberangkatan setelah diberlakukannya kebijakan masa tunggu tersebut.
- 3) Untuk mengetahui respon sosial jemaah haji terhadap dampak kebijakan masa tunggu, khususnya bagi jemaah yang mengalami penundaan atau kegagalan berangkat pada tahun berjalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan haji, baik secara akademis maupun praktis.

1.4.1 Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Manajemen Haji dan Umrah, khususnya dalam aspek manajemen kebijakan dan distribusi kuota keberangkatan haji. Penelitian ini memperkaya literatur empiris mengenai dampak kebijakan nasional terhadap pemerataan peluang keberangkatan jemaah haji di tingkat daerah, dengan menyoroti bagaimana kebijakan masa tunggu memengaruhi efektivitas manajemen antrian, alokasi kuota, serta dinamika penyusunan estimasi keberangkatan.

Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif manajerial dalam evaluasi implementasi kebijakan publik haji yang terfokus pada koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Haji dan Umrah, dan calon jemaah dalam konteks pelayanan ibadah massal. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana keputusan kebijakan di tingkat pusat dapat menghasilkan konsekuensi operasional yang signifikan di tingkat lokal, termasuk perubahan struktur daftar tunggu dan penyesuaian strategi pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang pengelolaan sumber daya jemaah haji dan pengaturan kuota berdasarkan wilayah geografis untuk mencapai keadilan, tetapi juga memperkaya kajian akademik mengenai mekanisme pemerataan kesempatan berangkat di tengah keterbatasan kuota nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dalam perbaikan sistem manajemen haji di masa mendatang, sekaligus memberikan dasar ilmiah bagi evaluasi dan penyusunan kebijakan masa tunggu yang lebih adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan jemaah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konkret dan aplikatif bagi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, khususnya bagi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertujuan membantu penyusunan kebijakan dan strategi operasional yang lebih adaptif terhadap kebijakan masa tunggu haji yang diberlakukan secara nasional pada tahun 2025 dan mulai diterapkan pada tahun 2026. Temuan penelitian

ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengoptimalkan proses perencanaan kuota, distribusi jemaah, dan penyesuaian estimasi keberangkatan di tingkat daerah.

Selain itu, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengelolaan peluang keberangkatan jemaah haji di Kabupaten Bandung, terutama dalam menghadapi perubahan signifikan dari sistem pembagian kuota wilayah sebelumnya menuju sistem nasa tunggu 26 tahun. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu membantu PPIH dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih responsif, baik dalam aspek sosialisasi kebijakan, pelayanan administrasi, maupun mitigasi dampak bagi jemaah yang terdampak kenaikan atau penurunan masa tunggu.

Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan dalam peningkatan tata kelola dan manajemen program haji di tingkat daerah, termasuk dalam mempersiapkan calon jemaah agar memiliki pemahaman yang lebih baik, sikap yang lebih adaptif, serta kesiapan mental terhadap perubahan kebijakan nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat teoritis dalam pengembangan ilmu Manajemen Haji dan Umrah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas layanan pemberangkatan haji, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta mendukung terciptanya pemerataan dan keadilan dalam pelayanan ibadah haji di Kemenhaj Kabupaten Bandung dan Indonesia secara umum.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Landasan Teoritis

Penelitian ini menggunakan Grand Theory Dampak Kebijakan J.E. Hosio (2007) sebagai satu-satunya landasan teoretis. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan publik menimbulkan dampak berupa perubahan kondisi, perilaku, dan persepsi pada jemaah sebagai kelompok sasaran kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, teori Hosio digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan masa tunggu haji menghasilkan dampak terhadap jemaah, baik dalam bentuk perubahan persepsi terhadap pelayanan haji, respons sosial yang muncul, dinamika psikologis, maupun penyesuaian harapan keberangkatan.

Melalui perspektif Grand Theory Dampak Kebijakan J.E. Hosio (2007), penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan masa tunggu haji diterima, ditafsirkan, dan dimaknai oleh jemaah haji di Kementerian Haji Kabupaten Bandung, dengan memandang dampak kebijakan sebagai konsekuensi yang muncul dari implementasi kebijakan publik baik secara langsung maupun tidak langsung, serta mencakup dampak yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan terhadap kelompok sasaran. Pendekatan ini memungkinkan penelitian melihat dampak kebijakan masa tunggu haji tidak hanya dari sisi administratif dan teknis, tetapi juga dari sisi sosial dan psikologis yang secara langsung memengaruhi cara jemaah memahami masa tunggu serta peluang keberangkatan mereka setelah terjadinya perubahan kebijakan.

Dengan demikian, Theory Dampak Kebijakan J.E. Hosio (2007) menjadi kerangka utama yang menjelaskan bagaimana kebijakan masa tunggu haji

membentuk perubahan persepsi kolektif, pola penerimaan dan pemaknaan informasi, munculnya kecemasan sosial, serta dinamika penyesuaian harapan keberangkatan jemaah haji di Kementerian Haji Kabupaten Bandung.

1.5.1.1 Teori Dampak (J.E. Hosio 2007)

Dampak menurut JE. Hosio (2007 :57) adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku.(Novendra dkk., 2021)

Teori Dampak Kebijakan ini dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana suatu kebijakan publik menimbulkan konsekuensi nyata terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosialnya. Teori ini menegaskan bahwa kebijakan tidak hanya menghasilkan keluaran administratif, tetapi juga menciptakan dampak kebijakan yang tercermin dalam perubahan kondisi, perilaku, dan persepsi masyarakat sebagai akibat dari implementasi kebijakan tersebut.

Dampak kebijakan didefinisikan sebagai segala bentuk perubahan kondisi objektif dan subjektif yang dialami oleh kelompok sasaran, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, serta yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Dalam konteks penelitian ini, dampak kebijakan masa tunggu jemaah haji di Kementerian Haji Kabupaten Bandung dipahami sebagai konsekuensi yang muncul akibat perubahan pengaturan masa tunggu, yang memengaruhi keberangkatan jemaah, sistem pelayanan, serta pengalaman sosial dan psikologis jemaah sebagai penerima kebijakan.

J.E. Hosio (2007) menjelaskan bahwa Dampak kebijakan mencakup dampak langsung, seperti perubahan masa tunggu dan kepastian keberangkatan jemaah, serta dampak tidak langsung, seperti perubahan persepsi terhadap keadilan pelayanan, tingkat kepuasan, munculnya kecemasan, ketidakpastian, dan penyesuaian harapan keberangkatan. Dampak-dampak tersebut muncul sebagai hasil interaksi antara substansi kebijakan masa tunggu, mekanisme implementasi di Kemenhaj Kabupaten Bandung, serta kondisi sosial jemaah yang terdampak. Lebih lanjut, Teori ini menegaskan bahwa dampak kebijakan bersifat multidimensional, meliputi dimensi administratif, sosial, dan psikologis.

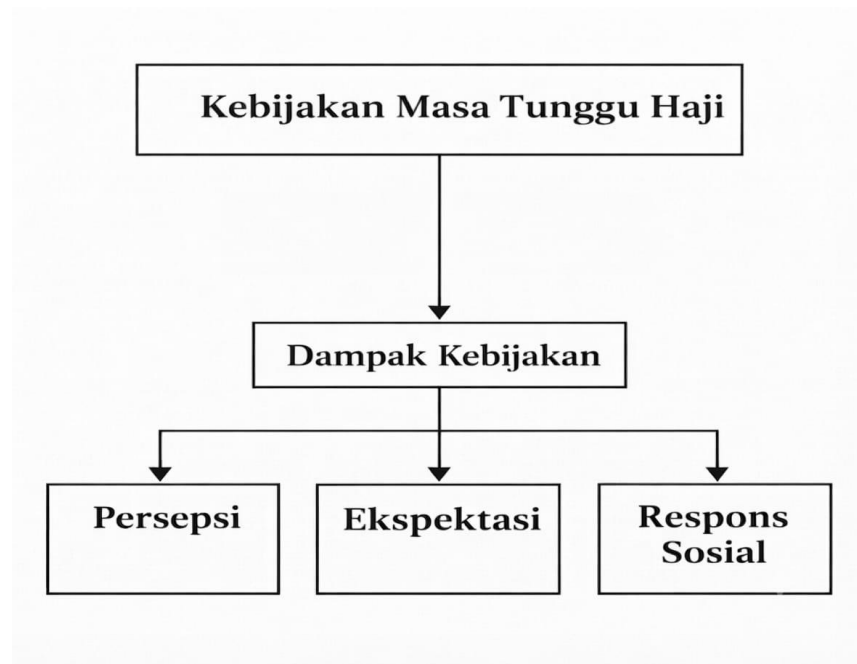
1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan skema berpikir yang menunjukkan hubungan logis antara konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Kerangka ini dibangun berdasarkan sintesis dari Grand Theory Dampak Kebijakan J.E. Hosio (2007) yang telah dipaparkan sebelumnya, kemudian dioperasionalisasikan ke dalam konteks penelitian Analisis Dampak Kebijakan Masa Tunggu Jemaah Haji di Kemenhaj Kabupaten Bandung. Melalui teori Hosio, kebijakan masa tunggu dipahami sebagai kebijakan publik yang menimbulkan dampak kebijakan berupa perubahan kondisi, perilaku, dan persepsi jemaah sebagai kelompok sasaran, khususnya dalam menafsirkan perubahan masa tunggu, memahami peluang keberangkatan, serta merespons dinamika baru dalam sistem antrean haji.

Dalam teori ini, dampak kebijakan dipahami melalui konsekuensi yang muncul baik secara langsung maupun tidak langsung, serta yang bersifat direncanakan maupun tidak direncanakan. Kerangka konseptual ini memetakan

bagaimana kebijakan masa tunggu haji menciptakan dampak pada tingkat lokal, seperti perubahan persepsi keadilan pelayanan, munculnya kekhawatiran dan ketidakpastian, serta penyesuaian ekspektasi keberangkatan jemaah. Dengan demikian, kebijakan diposisikan sebagai variabel utama yang memicu rangkaian dampak sosial dan psikologis sebagaimana ditekankan dalam Teori Dampak J.E. Hosio (2007).

Kerangka konseptual di bawah ini menjadi landasan, arah, dan batasan alur penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menempatkan kebijakan masa tunggu jemaah haji sebagai faktor utama yang memicu perubahan dalam dinamika sosial dan persepsi masyarakat terkait peluang keberangkatan di Kemenhaj Kabupaten Bandung. Mengacu pada Teori Dampak Kebijakan J.E. Hosio (2007), kebijakan tersebut dianalisis melalui perubahan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan, serta melalui identifikasi dampak langsung dan dampak tidak langsung yang dialami jemaah. Kerangka konseptual ini menegaskan bahwa peluang keberangkatan jemaah haji di Kemenhaj Kabupaten Bandung sangat dipengaruhi oleh bagaimana jemaah memaknai dampak kebijakan masa tunggu dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, hubungan antara kebijakan, dampak kebijakan, respons jemaah, dan persepsi peluang keberangkatan menjadi fokus utama dalam proses analisis penelitian ini.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

1.6 Langkah Langkah Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kemenhaj Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu daerah dengan jumlah pendaftar haji yang sangat tinggi sehingga menjadi salah satu wilayah yang terdampak oleh kebijakan masa tunggu jemaah haji. Kemenhaj Kabupaten Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian karena kebijakan ini berpotensi mengubah secara signifikan struktur antrean, distribusi nomor porsi, serta persepsi masyarakat mengenai peluang keberangkatan. Secara khusus, pemilihan lokasi penelitian ini menjadi semakin relevan karena pada tahun 2026 Kemenhaj Kabupaten Bandung mengalami penurunan kuota jemaah haji secara drastis, dari sekitar 2.564 jemaah menjadi hanya 439 jemaah.

1.6.2 Paradigma dan Pendekatan

Menurut Sugiyono (2019), paradigma penelitian adalah cara pandang atau pola pikir peneliti terhadap suatu masalah yang dijadikan dasar dalam melakukan penelitian. Paradigma menunjukkan bagaimana peneliti memahami realitas, hubungan antar variabel, serta metode yang digunakan untuk memperoleh data dan menarik kesimpulan. Penelitian ini berpijak pada paradigma konstruktivisme, yaitu suatu perspektif yang memandang bahwa realitas sosial tidak berdiri secara objektif dan tunggal, tetapi dibentuk, dipersepsi, dan dimaknai secara subjektif oleh individu maupun kelompok berdasarkan pengalaman mereka masing-masing. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan masa tunggu jemaah haji bukan hanya dipahami sebagai produk administratif atau keputusan teknokratis, melainkan sebagai suatu realitas sosial baru yang dipersepsikan, ditafsirkan, dan direspons secara beragam oleh jemaah haji di Kemenhaj Kabupaten Bandung. Realitas mengenai peluang keberangkatan tidak bersifat pasti dan statis, tetapi terbentuk melalui interaksi antara kebijakan pemerintah, kondisi kuota aktual, serta persepsi, harapan, dan reaksi jemaah yang terdampak langsung oleh perubahan kebijakan tersebut. Dengan demikian, paradigma konstruktivisme memungkinkan penelitian ini menggali bagaimana jemaah memaknai kebijakan masa tunggu serta bagaimana persepsi tersebut membentuk cara mereka memahami peluang keberangkatan pada tahun 2026.

1.6.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis-komparatif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis dampak kebijakan serta membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Studi kasus dipilih karena mampu memberikan fokus yang tajam terhadap konteks yang akan dikaji, yaitu dampak kebijakan masa tunggu Jemaah Haji terhadap peluang keberangkatan di Kemenhaj Kabupaten Bandung. Melalui studi kasus, penelitian ini menelaah secara mendalam dinamika yang terjadi pada satu wilayah yang terdampak secara signifikan oleh perubahan kebijakan, termasuk pergeseran nomor porsi, perubahan struktur antrean, serta penurunan drastis kuota jemaah pada tahun 2026.

Pendekatan deskriptif analitis-komparatif digunakan untuk membandingkan sekaligus menganalisis kondisi sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan masa tunggu haji, sehingga perubahan-perubahan penting yang terjadi pada peluang keberangkatan jemaah dapat diidentifikasi secara jelas. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan fenomena yang tampak di permukaan, tetapi juga menganalisis bagaimana kebijakan tersebut dipersepsikan, dirasakan, dan dimaknai oleh jemaah sebagai pihak yang terdampak langsung. Pendekatan deskriptif analitis-komparatif memungkinkan penelitian mengungkap secara lebih komprehensif hubungan antara kebijakan masa tunggu, perubahan kondisi kuota, persepsi sosial masyarakat, serta peluang keberangkatan jemaah haji di Kementerian Haji Kabupaten Bandung.

1.6.4 Jenis Data dan Sumber Data

1.6.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada data deskriptif dari hasil wawancara dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan fokus penelitian ini.

1.6.4.2 Sumber data

Sumber data merupakan peranan penting dalam penelitian karena menjadi dasar untuk menilai validitas hasil yang diperoleh. Dalam konteks ini, peneliti memakai :

1) Sumber Data Primer

Data primer menurut Sugiyono (2019) adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui teknik pengumpulan seperti wawancara, observasi, atau dokumentasi langsung kepada narasumber. Data ini memberikan informasi aktual dari pihak yang memiliki pengalaman, pengetahuan, atau keterlibatan langsung dengan objek penelitian sehingga dianggap sebagai sumber informasi yang paling otentik. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Petugas Haji pada Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung yang terlibat dalam pengelolaan pendaftaran dan distribusi kuota, serta jemaah haji di Kemenhaj Kabupaten Bandung yang terdampak kebijakan masa tunggu jemaah haji.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder menurut Sugiyono (2019) adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah,

laporan resmi, arsip pemerintah, maupun dokumen instansi. Data ini berfungsi sebagai pelengkap dan penguat dari data primer, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif, mendalam, dan memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi). Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari dokumen kebijakan dan arsip resmi Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung, termasuk data kuota haji, daftar nomor porsi, regulasi masa tunggu Jemaah Haji, serta laporan penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya. Data ini digunakan untuk memperkuat analisis komparatif terkait perubahan peluang keberangkatan jemaah sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan.

1.6.5 Penentuan Informan atau Unit Penelitian

1.6.6 Informan dan Unit Analisis

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka adalah pihak yang paling memahami dampak dan dinamika yang muncul akibat diberlakukannya kebijakan masa tunggu Jemaah Haji. (Sugiyono, 2019) Informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pendaftaran haji dan pengelolaan kuota di Kemenhaj Kabupaten Bandung.

Unit analisis penelitian ini adalah Jemaah Haji Kabupaten Bandung dan Petugas Haji pada Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung, karena keduanya merupakan kelompok yang terdampak langsung oleh perubahan kebijakan masa tunggu dan penurunan kuota jemaah pada tahun 2026. Petugas haji sebagai pengelola administrasi pendaftaran memiliki pemahaman yang mendalam

mengenai perubahan nomor porsi, distribusi kuota, serta kondisi sistem sebelum dan sesudah Kebijakan masa tunggu diberlakukan. Sementara itu, jemaah haji dipilih sebagai informan karena mereka merasakan langsung perubahan peluang keberangkatan dan memiliki persepsi yang beragam terhadap kebijakan tersebut. Melalui kedua kelompok informan ini, penelitian dapat menggali secara mendalam bagaimana kebijakan masa tunggu dipahami, dirasakan, dan dimaknai, serta bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi peluang keberangkatan jemaah haji Kabupaten Bandung pada tahun 2026.

1.6.7 Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi pengalaman mereka terhadap dampak kebijakan masa tunggu Jemaah Haji. Informan terdiri dari Petugas Haji Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung yang terlibat langsung dalam proses pendaftaran dan pengelolaan kuota, Ketua KBIHU, serta jemaah haji yang terdampak perubahan peluang keberangkatan. Ketiganya dipilih karena memiliki keterlibatan langsung, pemahaman mendalam, serta kesiapan untuk berbagi pengalaman terkait perubahan nomor porsi, persepsi masa tunggu, dan dinamika keberangkatan setelah kebijakan diberlakukan.

1.6.8 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, peneliti memperoleh data melalui penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lokasi obyek yang diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian lapangan ini dilakukan dengan metode :

1.6.8.1 Observasi

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara terang-terangan dan tidak berstruktur untuk mengamati proses pelayanan pendaftaran haji, dinamika pengelolaan kuota, serta interaksi antara petugas dan jemaah di Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung. Observasi ini digunakan untuk memahami secara langsung bagaimana kebijakan masa tunggu Jemaah Haji berpengaruh terhadap mekanisme pelayanan dan peluang keberangkatan jemaah di Kemenhaj Kabupaten Bandung.

1.6.8.2 Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan umum namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih luas. Bentuk wawancara ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam pemahaman Petugas Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung dan jemaah terkait perubahan kebijakan masa tunggu Jemaah Haji.

1.6.8.3 Dokumentasi

Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi pedoman kerja, arsip internal, serta dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan manajemen dan pelaksanaan kebijakan masa tunggu, distribusi kuota haji, dan administrasi jemaah haji di Kemenhaj Kabupaten Bandung.

1.6.9 Teknik Penentuan Keabsahan data

Dalam penelitian ini, validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai informan yang berbeda, seperti pejabat Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung, Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah, Petugas Haji Daerah, serta Jemaah Haji yang menjadi subjek penelitian. Pendekatan ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat diverifikasi secara menyeluruh dari berbagai perspektif yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan masa tunggu Jemaah haji. Sedangkan triangulasi metode melibatkan penggunaan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan dan jemaah haji, serta analisis dokumen resmi terkait kebijakan dan distribusi kuota haji. Dengan kombinasi triangulasi sumber dan metode ini, penelitian diharapkan memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan valid mengenai pelaksanaan kebijakan serta dampaknya terhadap peluang keberangkatan jemaah haji di Kemenhaj Kabupaten Bandung, sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.6.10 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan yang dirancang untuk menangkap makna, menelusuri pola, dan mengurai lapisan-lapisan pengalaman yang dialami oleh petugas haji, jemaah haji, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses adaptasi terhadap kebijakan masa tunggu Jemaah Haji di Kabupaten Bandung. Teknik analisis yang digunakan

mengacu pada model interaktif dari (Miles dan Huberman, 1994), yang meliputi tiga tahap utama yaitu sebagai berikut :

1.6.10.1 Reduksi Data

Proses analisis data ini dilakukan sejak awal pengumpulan data dalam penelitian yang berfokus pada kebijakan masa tunggu jemaah haji dan dampaknya terhadap peluang keberangkatan jemaah di Kemenhaj Kabupaten Bandung. Peneliti mulai memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasi data mentah berupa narasi hasil wawancara dengan petugas haji, jemaah haji, dan dokumen kebijakan terkait ke dalam bentuk yang lebih tajam dan bermakna. Pada tahap ini, peneliti menandai pernyataan-pernyataan yang mengandung nilai strategis untuk menggambarkan aspek manajemen kinerja tim petugas haji dalam melaksanakan kebijakan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas dan tantangan dalam pengelolaan keberangkatan jemaah haji.

1.6.10.2 Penyajian Data

Dalam penelitian ini, data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk naratif dan matriks tematik sesuai konteks kebijakan masa tunggu jemaah haji dan peluang keberangkatan jemaah di Kemenhaj Kabupaten Bandung. Setiap tema, seperti respon terhadap kebijakan masa tunggu, tantangan di lapangan, bentuk manajemen kinerja tim petugas haji, dan pelayanan kepada jemaah, dirangkai menjadi sebuah alur narasi yang merepresentasikan kondisi nyata sebagaimana dituturkan oleh para informan, yaitu petugas haji, pejabat terkait, dan jemaah haji. Penyajian data tidak hanya berupa kutipan langsung, tetapi juga dikontekstualisasikan agar pesan dan maknanya tetap utuh.

1.6.11 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini bersifat sementara dan terus diuji selama proses penelitian berlangsung. Verifikasi data dilakukan dengan mencermati konsistensi antar sumber, melakukan member check kepada informan, serta mencocokkan temuan dengan dokumen pendukung. Peneliti tidak hanya merumuskan apa yang terjadi, tetapi juga mengungkap bagaimana dan mengapa proses adaptasi terhadap kebijakan masa tunggu jemaah haji berlangsung sebagaimana adanya.

Proses analisis ini lebih dari sekadar teknik, merupakan usaha memahami pengalaman manusia di tengah sistem yang kompleks, menafsirkan tindakan petugas dan jemaah haji, serta menghargai strategi yang mereka rancang dalam menghadapi kebijakan yang berubah-ubah. Dengan demikian, analisis tidak hanya bertujuan menghasilkan simpulan akademik, tetapi juga mengangkat suara, pengalaman, dan nilai praksis para petugas haji dan jemaah yang berperan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.

